

RENCANA KERJA
BIDHUMAS POLDA JAMBI T.A. 2023

I. Latar Belakang

1. Kondisi Umum

Tahun 2023 merupakan tahun ke-4 (empat) dari Tahapan Rencana Strategis Polda Jambi 2020-2024 dan sebagai kelanjutan dari Rencana Kerja Polda Jambi T.A. 2022 sehingga dilakukan penyusunan Rencana Kerja Polda Jambi T.A. 2023. Rencana Kerja Polda Jambi T.A. 2023 ini merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Polda Jambi 2020-2024. Rencana Kerja Polda Jambi T.A. 2023 disusun dengan memperhatikan Renja Polri T.A. 2023 yang mengacu pada RPJMN 2020-2024, yaitu: (1) pilar keamanan dalam negeri; (2) pilar pertahanan; (3) pilar keamanan laut; (4) pilar keamanan dan ketertiban masyarakat; dan (5) pilar keamanan Siber, diperlukan “*Safe Guarding*” penuntasan target prioritas nasional RPJMN 2020-2024 mengingat pada tahun 2024 merupakan tahun politik, agenda Pemilu dan masa transisi.

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) pada periode kepemimpinan 2021-2024 telah menetapkan *tagline* “Transformasi Menuju Polri Yang Presisi” (Prediktif, Responsibilitas dan Transparansi Berkeadilan). Konsep ini merupakan fase lebih lanjut dari kepemimpinan Polri sebelumnya dengan pendekatan pemolisian berorientasi masalah (*Problem Oriented Policing*). Dalam kepemimpinan POLRI PRESISI, ditekankan pentingnya kemampuan pendekatan pemolisian prediktif (*predictive policing*) agar Polri mampu menakar tingkat gangguan Kamtibmas melalui analisa berdasarkan pengetahuan, data, dan metode yang tepat sehingga dapat dicegah sedini mungkin. Kata responsibilitas dan transparansi berkeadilan menyertai pendekatan pemolisian prediktif yang ditekankan agar setiap insan Bhayangkara mampu melaksanakan tugasnya secara cepat dan tepat, responsif, humanis, transparan, bertanggung jawab, dan berkeadilan.

Keberhasilan yang diraih Polri diharapkan dapat membuat Polri semakin waspada dan meningkatkan antisipasi terhadap berbagai tantangan di masa mendatang. Tantangan tersebut berupa adanya harapan dan tuntutan dari masyarakat maupun pemerintah kepada Polri untuk dapat senantiasa terus-menerus secara berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan masyarakat di bidang kepolisian. Tantangan dan harapan masyarakat serta pemerintah kepada Polri adalah: (1) Polri yang semakin profesional, mandiri, transparan, adil, humanis namun tegas, bermoral, modern dan bebas dari KKN dalam memberikan pelayanan kepolisian yang "*Presisi*"; (2) menggelar kekuatan Polri hingga ke perbatasan dalam rangka mengantisipasi ambang gangguan di tengah-tengah masyarakat sehingga keberadaannya dapat memberikan rasa aman, tenteram dan nyaman; (3) menegakkan hukum secara profesional, proporsional, tegas, jujur, adil dan tuntas, terhadap gangguan nyata serta mewujudkan transparansi dalam proses penyidikan tindak pidana; (4) meningkatnya fungsi intelijen yang mampu mendeteksi, mengantisipasi dan mencegah setiap potensi gangguan Kamtibmas.

Dalam Rencana Kerja di tahun 2023, Polri telah menyusun Rencana Kerja Polri T.A. 2023, yang merupakan dokumen perencanaan tahunan yang disusun sebagai penjabaran pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Polri tahun 2020–2024. Dalam Renja Polri T.A. 2023, terdiri dari 6 Sasaran Prioritas, 5 Program, 39 Arah Kebijakan dan 174 Strategi. Selain itu penyusunan Rencana Kerja juga dilakukan dalam rangka memenuhi amanat Undang-Undang (UU) Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional. Rencana Kerja (Renja) Polri T.A. 2023 memuat arah kebijakan dan strategi demi menjaga kesinambungan pembangunan secara terencana, sistematis dan tanggap akan perubahan. Rencana Kerja (Renja) Polri T.A. 2023 sejalan dengan Program Prioritas Kapolri dalam Transformasi Menuju Polri Yang Presisi.

3 LAMPIRAN KEP BIDHUMAS POLDA JAMBI
NOMOR : KEP/ /X/2022
TANGGAL : OKTOBER 2022

Rencana Kerja (Renja) Polri T.A. 2023 mengacu kepada RPJMN Tahun 2020–2024, pembangunan nasional dilakukan dengan memperhatikan 7 (tujuh) Agenda Pembangunan yang tetap dipertahankan dengan memperhatikan Prioritas Nasional pada RKP Tahun 2023. Hal ini untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengoptimalkan efektivitas pengendalian pembangunan dalam upaya pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah. Prioritas Nasional dalam RKP Tahun 2023 adalah: (1) memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan; (2) mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan; (3) meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing; (4) revolusi mental dan pembangunan kebudayaan; (5) memperkuat infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar; (6) membangun lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim; (7) memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Rencana Kerja (Renja) Polda Jambi T.A 2023 mengakomodir:

- a. Rencana Kerja (Renja) Polri T.A. 2023 sesuai dengan RPJMN Tahun 2020-2024;
- b. Pilar keamanan dalam negeri yang akan dicapai dalam RPJMN Tahun 2020-2024;
- c. Kebijakan Prioritas Nasional Pemerintah tahun 2023 di bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan (Polhukhankan) khususnya pada pembangunan stabilitas keamanan dan ketertiban pada bidang Polri;
- d. Tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2023 yaitu: “Meningkatkan SDM Berkualitas, Keunggulan Kompetitif Wilayah dan Infrastruktur Berkelanjutan untuk Mendukung Industri Berbasis Teknologi Maju”.

Penyusunan Rencana Kerja Polda Jambi T.A. 2023 juga memperhatikan dan mempertimbangkan semua isu strategis baik global, regional dan nasional sebagai bahan masukan. Selanjutnya kondisi internal dan eksternal Polda Jambi dipengaruhi oleh perubahan dan perkembangan lingkungan strategis tersebut akan digambarkan sebagai berikut:

a. Perkembangan Aspek Kehidupan

1) Global

Perkembangan lingkungan strategis global yang senantiasa dipengaruhi oleh isu-isu seperti penyebaran *Covid-19* dan vaksinya, isu hak asasi manusia, krisis ekonomi, radikalisme dan terorisme, siber dan kejahatan lintas negara. Perubahan lingkungan strategis global secara spesifik dapat dilihat sebagai berikut:

- a) wabah *Covid-19* telah mengakibatkan krisis pada sektor kesehatan publik, ekonomi nasional dan global, stabilitas sosial dan tata kelola, yang menyebabkan adanya disrupsi inovasi teknologi, perubahan norma dan perilaku pola sukarela dan terpaksa tidak terelakkan dan tidak dapat kembali pada keadaan semula;
- b) berkurangnya minat negara Amerika Serikat untuk berinvestasi mempertahankan bangunan politik dunia membuat lembaga internasional seperti *World Health Organization (WHO)* dan lembaga lainnya tidak efektif. Hal ini menunjukkan bahwa tanpa dukungan negara yang kuat, lembaga internasional tidak akan efektif dan terhambat;
- c) ketidaksiapan lembaga internasional telah memacu perlombaan antarnegara dan mempercepat tren deglobalisasi. Selain itu memunculkan perdebatan lama tentang keefektifan negara otoriter dan negara demokratis;
- d) perekonomian dunia masih dibayang-bayangi krisis dan wabah *Covid-19*, tetapi secara gradual ekonomi dunia tumbuh dengan meningkatnya konsumsi dan produksi seiring relaksasi kebijakan moneter dan fiskal;
- e) dampak *Covid-19* telah menyebabkan rantai pasokan dunia sempat terhenti. Kondisi ini menyebabkan menurunnya perekonomian dunia dan negara-negara yang bergantung pada rantai pasokan dunia;

5 LAMPIRAN KEP BIDHUMAS POLDA JAMBI
NOMOR : KEP/ /X/2022
TANGGAL : OKTOBER 2022

- f) Menguatnya peran aktor non pemerintah seperti *Non-Governmental Organization* (NGO) yang mengusung Isu HAM, demokrasi, *good governance*, lingkungan hidup, terorisme
- g) pemulihan krisis ekonomi dunia menunjukkan perkembangan yang positif. Bank Dunia memprediksi perekonomian dunia akan tumbuh pada tahun 2021 sebesar 4,8%, tahun 2022 sebesar 4,9% dan pada tahun 2023 akan tumbuh menyentuh 5,0;
- h) pada tahun 2023 tantangan berat bagi Indonesia dan negara berkembang lainnya dalam rangka pemulihan ekonomi dan kesehatan publik, yaitu konflik Rusia dan Ukraina yang berlarut, tingginya utang luar negeri, melonjaknya harga pangan dan BBM serta minimnya vaksin. Meningkatnya utang luar negeri akan berdampak pada menipisnya ruang-ruang fiskal yang berakibat pada kemampuan negara untuk melayani kepentingan warga negaranya;
- i) konflik lahan, sumber daya alam dan energi untuk memenuhi kebutuhan energi dan bahan baku industri, masih akan terus berlangsung seiring dengan pemulihan ekonomi dan akselerasi ketegangan Tiongkok dan Amerika Serikat serta Rusia dan Ukraina;
- j) kerusakan lingkungan berdampak pada kelangkaan lahan, kelangkaan pangan, kelangkaan sumber energi, kelangkaan air bersih dan udara bersih akan mengancam keamanan manusia. Hal ini diperparah dengan adanya perubahan iklim yang menyebabkan terganggunya ketahanan dan kemampuan beradaptasi manusia dalam memenuhi kebutuhan dasarnya, sehingga secara signifikan akan mempengaruhi dinamika politik, perekonomian, adanya krisis air dan pangan, munculnya berbagai penyakit pandemik, migrasi penduduk dan konflik sosial;

- k) isu lingkungan hidup, perubahan iklim, HAM, demokrasi, *good governance*, terorisme, masih menjadi topik utama diplomasi internasional. Hal ini didukung oleh kuatnya aktor nonnegara termasuk NGO dalam mempengaruhi diplomasi internasional dan perumusan kebijakan;
- l) perkembangan teknologi informasi yang cepat telah mengubah paradigma dan pola hidup masyarakat dunia. Kemudahan yang ditawarkan oleh teknologi informasi dapat dimanfaatkan secara politik, ekonomi, sosial budaya, maupun keamanan. Dampak dari masifnya pemanfaatan teknologi informasi adalah perang siber, yaitu untuk melemahkan kemampuan pertahanan suatu negara. Sasarannya adalah sabotase, peretasan dan spionase terhadap sistem komputer, militer dan pertahanan serta pengambilan data-data rahasia pemerintah negara lain, bahkan pada sistem pengelolaan listrik, air, bahan bakar, transportasi dan komunikasi.

2) Regional

Perkembangan lingkungan strategis regional secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya bagi Indonesia. Lingkungan strategis regional saat ini dipengaruhi beberapa isu, yaitu: konflik politik dan keamanan di kawasan Asia Tenggara, sengketa perbatasan negara, baik perbatasan darat, laut, dan udara, kerja sama antara negara Asean di bidang ekonomi, pertahanan dan keamanan. Isu-isu strategis tersebut secara spesifik yaitu:

- a) adanya pergeseran perhatian politik dunia dari Trans Atlantic ke Trans Pasifik. Di Pasifik sendiri telah berdiri 2 blok perdagangan yang masing-masing berafiliasi ke Amerika Serikat dan Tiongkok. Netralitas ASEAN dan negara-negara anggotanya dalam blok perdagangan di Asia Pasifik menjadikan ASEAN semakin strategis dan menguntungkan bagi negara anggota;

- b) Indonesia akan mendapatkan peran sebagai Ketua ASEAN 2023. Tantangan Indonesia bagi ASEAN adalah mempertahankan sentralitas dan kesatuan ASEAN dalam menjaga stabilitas dan perdamaian kawasan. Peran aktif dan kepemimpinan Indonesia di ASEAN untuk mendorong pihak-pihak yang bersengketa menahan diri dan mengutamakan dialog dalam penyelesaian masalah;
- c) situasi krisis kemanusiaan di Myanmar diprediksi apabila terus berlanjut akan menimbulkan instabilitas kondisi keamanan. Dampak krisis kemanusiaan di Myanmar bersifat lintas negara/*transboundary*, sehingga bisa membawa paham radikalisme, ekstremisme terorisme serta mendorong tindakan *irregular movement of persons* etnis Rohingya keluar dari wilayah Myanmar. Dalam hal ini penting untuk mendorong kerja sama ASEAN guna penyelesaian situasi kemanusiaan Rakhine dan akar masalahnya;
- d) sengketa di Laut Cina Selatan berpotensi menjadi konflik terbuka, karena para pihak yang terlibat dalam sengketa Laut Cina Selatan sering menggunakan instrumen militer untuk memperkuat klaimnya. Selain itu juga disebabkan adanya keterlibatan negara- negara di luar kawasan dalam konflik dan belum ada institusi atau organisasi internasional yang kredibel dalam menyelesaikan sengketa Laut Cina Selatan. Namun putaran perundingan terakhir antara ASEAN dan Tiongkok berpengaruh dalam penyelesaian sengketa secara damai dan bermartabat;
- e) kompleksitas keamanan di kawasan Asia Timur masih berpotensi tidak stabil, karena Amerika Serikat masih tetap memainkan peranan pentingnya. Hal ini disebabkan oleh ketidakstabilan di Semenanjung Korea, hubungan tradisional Amerika dengan Jepang dan Korea Selatan, serta kekhawatiran Amerika terhadap tampilnya Tiongkok sebagai kekuatan hegemoni regional maupun karena kepentingan ekonominya;

8 LAMPIRAN KEP BIDHUMAS POLDA JAMBI
NOMOR : KEP/ /X/2022
TANGGAL : OKTOBER 2022

- f) kawasan Asia Tengah diwarnai dengan kemenangan Taliban atas Kabul yang didukung Amerika Serikat, yang secara langsung mendapatkan sambutan kerja sama ekonomi dari Tiongkok. Dinamika kawasan ini semakin menarik karena akan menjadi jalur sutera antara Asia dan Eropa dan menjadi pintu bagi Tiongkok untuk melakukan ekspansi ke wilayah Eropa. Hal ini memecah konsentrasi konflik perebutan Laut Cina Selatan;
- g) kawasan Timur Tengah akan diwarnai ketegangan Iran dan Saudi Arabia untuk menjadi pemain tunggal di kawasan itu. Teluk Hurmuz menjadi wilayah perebutan bagi Iran. Kepentingan Rusia, Amerika Serikat dan Uni Eropa terhadap energi di kawasan tersebut menyebabkan kawasan tersebut semakin rumit;
- h) kawasan strategis Timur Tengah yang menjadi pemicu ketegangan adalah Terusan Suez (Mesir) dan Bab el Mandeb (Djibouti-Yaman) dan juga Selat Hormuz (Iran-Oman), karena merupakan lokasi vital bagi pelayaran dan perdagangan dunia yang membutuhkan pengamanan;
- i) perekonomian negara berkembang di Asia diprediksi tumbuh paling tinggi pada tahun 2022, yakni sebesar 6,4%. Amerika Serikat menyusul dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi 2022 sebesar 4,9%. Kemudian Kawasan Britania Raya diproyeksi memiliki pertumbuhan ekonomi sebesar 4.8%. Pertumbuhan ekonomi Eropa diperkirakan mencapai 4.3% pada tahun 2022. Kawasan Afrika Sub-Sahara diprediksi memiliki pertumbuhan ekonomi mencapai 4,1% pada 2022. Sedangkan pertumbuhan ekonomi Timur Tengah dan Asia Tengah pada 2022 diproyeksi mencapai 3,7% pada tahun 2022.

3) Nasional

Lingkungan strategis nasional tidak bisa terlepas dari tantangan situasi dan kondisi dalam negeri tahun 2023 yang perlu diwaspadai terkait tren PDB (defisit APBN kembali ke level maksimal 3% sesuai UU Nomor 2 Tahun 2020) naik seiring pemulihan ekonomi, artinya APBN naik namun kapasitas belanja dibatasi serta kriteria prioritas dan alokasi program/kegiatan perlu dipertajam. Perkembangan di dalam negeri dipengaruhi oleh lingkungan strategi global maupun regional. Dinamika lingkungan strategis nasional sangat mempengaruhi kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat dan bahkan dapat menimbulkan gangguan Kamtibmas dalam negeri. Berikut diuraikan potensi gangguan Kamtibmas:

a) Politik dan Pemerintahan

- (1) banyaknya pejabat sementara Bupati/Walikota/Gubernur karena ditundanya Pemilukada 2022 dan 2023, berakibat kewenangan yang terbatas bagi Pejabat Sementara akan menghambat dalam pengambilan keputusan strategis di daerah;
- (2) terbatasnya jumlah PNS yang tersedia untuk mengisi Pejabat Sementara Bupati/Walikota/Gubernur, konflik antarpolitik di DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota, sangat mempengaruhi pemilihan dan keefektifan dalam menjalankan pemerintahan;
- (3) perpindahan Ibu Kota Negara akan menjadi fokus isu dan akan sangat dinamis pada tahun 2023;
- (4) pelaksanaan Pemilu Serentak 2024 akan menjadikan seluruh aktor politik berkonsentrasi pada agenda politik 2024, sehingga program pembangunan relatif tidak diperhatikan;
- (5) agenda pembentukan KPU dan perangkat pemilu lainnya, undang-undang persiapan dan jadwal penyelenggaraan Pemilu dan undang-undang Pemilu, terutama berkaitan dengan ambang batas DPR RI dan pemilihan Presiden RI.

b) Ekonomi dan Perdagangan

- (1) pada tahun 2023 pertumbuhan ekonomi Indonesia diprediksi positif dan tumbuh sekitar 6%, Hal ini karena mulai banyaknya aktivitas konsumsi masyarakat dan agenda pemulihan ekonomi dampak wabah Covid-19 namun yang perlu diantisipasi adalah bayang-bayang resesi sebagai akibat dari konflik Rusia dan Ukraina;
- (2) perubahan iklim yang berdampak pada daya dukung lingkungan, ekonomi dan sosial, akan menyebabkan ketahanan pangan dan kerentanan sosial ekonomi dan lingkungan;
- (3) Indonesia masih mengalami defisit dalam neraca pembayaran, karena produktivitas nasional yang rendah. Ekspor Indonesia belum mampu mengimbangi nilai impor yang dilakukan.

c)

c) Transportasi

- (1) dampak *Covid-19* terhadap sektor transportasi khususnya udara, kereta api dan laut, berdampak pada perkembangan sektor lainnya seperti pariwisata, perdagangan dan industri;
- (2) pembangunan transportasi relatif tidak merata di setiap wilayah. Penambahan jalan arteri dan tol tidak berbanding dengan bertambahnya jumlah kendaraan, sehingga menyebabkan terjadinya kemacetan;
- (3) bertambahnya sarana seperti pelabuhan, bandara dan jalan tol belum terkoneksi dengan baik sebagai sistem transportasi dan logistik.

d) Ketenagakerjaan

- (1) meningkatnya pengangguran karena tidak berkembangnya investasi dan banyaknya relokasi industri ke negara lain seperti Thailand dan Vietnam;

- (2) UU Cipta Kerja yang diharapkan dapat meningkatkan kesempatan kerja dan berusaha tampaknya lebih membelenggu tenaga kerja;
 - (3) banyaknya tenaga kerja tidak terampil menyebabkan Indonesia tidak bisa mengambil manfaat dari bonus demografi;
 - (4) penggunaan teknologi menyebabkan banyak sektor mengurangi jumlah tenaga kerja.
- e) Lahan, SDA dan Lingkungan Hidup
- (1) permintaan lahan dan SDA akan meningkat seiring dengan kebutuhan pasokan industri dan pemulihan ekonomi;
 - (2) konflik lahan akan semakin meningkat antar masyarakat, masyarakat dengan pengusaha dan masyarakat dengan Pemerintah;
 - (3) minimnya pembangunan *smelter* untuk mengolah hasil tambang akan menyebabkan perdagangan tambang mentah semakin meningkat;
 - (4) perubahan iklim berdampak pada ketahanan pangan dan daya dukung lingkungan yang dapat menyebabkan rentannya keamanan;
 - (5) Pidato Presiden Amerika di Kantor Intelijen yang menyatakan bahwa Jakarta akan tenggelam pada tahun 2030;
- f) Keluarga dan Perempuan
- (1) kekerasan dalam rumah tangga akan meningkat seiring dengan menurunnya pendapatan masyarakat dan meningkatnya aktivitas politik menjelang 2024;
 - (2) meningkatnya kasus perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga;

g) Korupsi, Hukum dan HAM

- (1) dibatalkannya sejumlah pasal dalam UU Nomor 2 Tahun 2020 oleh Mahkamah Konstitusi, di mana penyalahgunaan wewenang dalam penanganan *Covid-19* dapat dituntut dan pemerintah diminta untuk memberikan kepastian prediksi kapan darurat *Covid-19* berakhir akan mengalami eskalasi pada tahun 2023;
- (2) pelanggaran hukum dan HAM, baik yang terjadi di masa lalu, terkait penanganan *Covid-19* dan yang sedang terjadi, akan mengemuka pada tahun 2023;
- (3) tumpang tindih kewenangan oleh pejabat pemerintah akan menjadi isu yang dinamis pada tahun 2023;
- (4) isu lahan dan lingkungan akan mengemuka seiring dengan isu perubahan iklim yang mengancam daya adaptasi masyarakat terhadap perubahan alam;

h) Teknologi Informasi

- (1) penggunaan teknologi informasi yang semakin meningkat, baik transaksi elektronik maupun media sosial yang akan berdampak pada meningkatnya kejahatan;
- (2) banyaknya informasi asimetris dalam penggunaan teknologi informasi media sosial akan berdampak pada segregasi masyarakat dan kondusifitas keamanan dan ketertiban masyarakat;
- (3) teknologi informasi memberikan peluang kesempatan berusaha, namun belum dapat dimanfaatkan dengan optimal karena minimnya keterampilan dan pengetahuan.

i) Terorisme

- (1) meningkatnya persaingan AS dan Cina berdampak pada meningkatnya aksi-aksi teror, baik secara ekonomi, politik, militer dan budaya;

- (2) kemenangan Taliban dan kerja sama Tiongkok dengan Taliban telah memancing Timur Tengah dan Rusia untuk ikut dalam percaturan ini;
 - (3) persaingan ideologi kanan (Islam) dan kiri (komunis) dalam politik Indonesia akan semakin tampak pada tahun 2023;
 - (4) penggunaan senjata dan kekuatan militer tampaknya akan sangat berkurang dan digantikan teknologi dan informasi;
- j) Narkotika
- (1) letak geografis Indonesia yang mendukung serta meningkatnya kejahatan terhadap narkotika, membuat Indonesia sangat rentan menjadi lokasi penyelundupan maupun penyalahgunaan narkotika;
 - (2) minimnya pemahaman masyarakat terhadap peraturan dan perundangan tentang narkotika, jenis dan bentuk narkotika;
 - (3) kemampuan peraturan dan perundangan dalam mengantisipasi perkembangan jenis dan bentuk Narkoba relatif kurang;
 - (4) perencanaan yang andal dalam kerja sama dan koordinasi instansi terkait serta kerja sama internasional dalam penanggulangan penyelundupan dan penyalahgunaan narkotika;
- k) Otonomi Daerah
- (1) otonomi daerah pada tahun 2023 akan diwarnai dengan pergantian kepala daerah oleh Pejabat Sementara dan akan menjadi tarik-menarik politik;
 - (2) wilayah-wilayah yang memiliki karakter khusus seperti Papua, Papua Barat, Aceh perlu ditangani secara terencana;
 - (3) wilayah eks konflik seperti Maluku, Poso, Aceh dan Papua memerlukan perhatian khusus berkaitan dengan dinamika politik yang berkembang menjelang pergantian kepemimpinan nasional dan daerah pada tahun 2024;

- I) Keamanan dan Ketertiban Masyarakat
- (1) meskipun tahun 2017-2020 tren kejahatan menurun, namun selama pandemi mengalami tren naik yang signifikan. Tindak kejahatan yang banyak terjadi di masa pandemi *Covid-19* adalah kejahatan jalanan, kejahatan *cyber*, penculikan dan pencurian;
 - (2) sejalan dengan meningkatnya aktivitas politik dan pemulihan ekonomi, pada tahun 2023 tren kejahatan tampaknya akan meningkat dan berpola seperti tahun 2018-2019.

4) **Provinsi Jambi**

Jambi adalah sebuah Provinsi di Indonesia yang Ibu kotanya berada di Kota Jambi, dibentuk berdasarkan UU No 61 Tahun 1958 tanggal 25 Juli 1958, merupakan Provinsi yang memiliki luas 53.435 km². Provinsi Jambi secara geografis terletak antara 0,45° Lintang Utara, 2,45° Lintang Selatan dan antara 101,10°-104,55° Bujur Timur. Di sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Riau, sebelah Timur dengan Selat Berhala, sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan dan sebelah Barat dengan Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Bengkulu. Kondisi geografis yang cukup strategis di antara kota-kota lain di Provinsi sekitarnya membuat peran Provinsi ini cukup penting terlebih lagi dengan dukungan sumber daya alam yang melimpah. Kebutuhan industri dan masyarakat di kota-kota sekelilingnya didukung suplai bahan baku dan bahan kebutuhan dari Provinsi ini.

Luas Provinsi Jambi 53.435 km² dengan jumlah penduduk Provinsi Jambi berjumlah 3.532.126 jiwa atau dengan tingkat kepadatan 66,10 jiwa/km². Sebanyak 57,7% dari jumlah tenaga kerja Provinsi Jambi bekerja pada sektor pertanian, perkebunan dan perikanan; 15,9% pada sektor perdagangan dan 26,4% pada sektor jasa. Dengan kondisi ketenagakerjaan yang sebagian besar masyarakat di Provinsi ini sangat tergantung pada hasil pertanian, perkebunan sehingga menjadikan upaya pemerintah daerah maupun

pusat untuk mensejahterakan masyarakat adalah melalui pengembangan sektor pertanian.

Masyarakat Jambi merupakan masyarakat heterogen yang terdiri dari masyarakat asli Jambi, yakni Suku Melayu yang menjadi mayoritas di Provinsi Jambi sebesar 37,87%. Selain itu juga ada Suku Kerinci di daerah Kerinci dan sekitarnya yang berbahasa dan berbudaya mirip Minangkabau. Secara sejarah dan budaya merupakan bagian dari varian rumpun Minangkabau, Juga ada suku-suku asli pedalaman yang masih primitif yakni Suku Kubu dan Suku Anak Dalam. Selain itu juga ada pendatang yang berasal dari Minangkabau, Batak, Jawa, Sunda, Cina, India dan lain-lain.

Sebagian besar masyarakat Jambi memeluk agama Islam, yaitu sebesar 96,5%, sedangkan lainnya merupakan pemeluk agama Kristen, Buddha, Hindu dan Konghuchu.

Dengan kondisi suhu udara berkisar antara 26,1 °C sampai dengan 31 °C dan luas wilayah 53,435 km² diantaranya sekitar 60% lahan merupakan kawasan perkebunan dan kehutanan yang menjadikan kawasan ini merupakan salah satu penghasil produk perkebunan dan kehutanan utama di wilayah Sumatera. Kelapa sawit dan karet menjadi tanaman perkebunan primadona dengan luas lahan perkebunan kelapa sawit mencapai 259.786 hektar serta karet mencapai 623.825 hektar. Sementara itu, nilai produksi kelapa sawit sebesar 3.110 kg/ha pertahun. Hasil perkebunan lainnya adalah karet, dengan jumlah produksi 225,702 ton per tahun, kelapa dalam (*virgin coconut*) 119,600 ha menghasilkan 1.385kg/ha pertahun, casiavera 49,529 ha menghasilkan 2.626 kg/ha pertahun, serta teh 2.625 ha menghasilkan 2.328 kg/ha pertahun. Sementara produksi sektor pertanian yang dihasilkan oleh kawasan bagian barat Provinsi Jambi yaitu beras kerinci, kentang, kol/ kubis, tomat dan kacang kedelai.

Potensi kekayaan alam di Provinsi Jambi adalah minyak bumi, gas bumi, batu bara dan timah putih. Jumlah potensi minyak bumi Provinsi Jambi mencapai 1.270,96 juta m³ dan gas 3.572,44 milyar m³. Daerah cadangan minyak bumi utama di struktur Kenali Asam, Kecamatan

Jambi Luar Kota, Kabupaten Batang Hari dengan jumlah cadangan minyak 408,99 juta barrel. Sedangkan cadangan gas bumi utama di struktur Muara Bulian, Kecamatan Muara Bulian. Kabupaten Muaro Jambi dengan jumlah cadangan 2.185,73 milyar m³.

Wilayah administratif pemerintahan, pada tahun 2022 Provinsi Jambi terdiri dari 2 kota dan 9 Kabupaten yaitu : Kota Jambi dan Kota Sungai Penuh, Kabupaten Batang Hari, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Bungo, Kabupaten Tebo, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kabupaten Merangin, Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Kerinci. Kota Sungai Penuh Polresnya masih bergabung dengan Polres Kerinci, sedangkan untuk Polsek di jajaran Polda Jambi terdiri dari 94 Polsek dan 3 Polsubsektor (Polsek Urban sebanyak 5 Polsek, Polsek Rural sebanyak 81 Polsek dan Polsek Prarural sebanyak 8 Polsek);

Isu global maupun nasional, secara langsung maupun tidak langsung akan berpengaruh terhadap perkembangan isu lokal di Provinsi Jambi. Isu lokal ini akan meliputi berbagai aspek kehidupan masyarakat Jambi, sehingga perlu dilakukan pemahaman secara tepat dan akurat semua isu yang berkembang agar dapat direncanakan antisipasi sekaligus solusi untuk menjaga keberlangsungan pembangunan di Provinsi Jambi.

Perkembangan berbagai aspek kehidupan masyarakat, selain disebabkan oleh berbagai kondisi yang ada di daerah, juga karena adanya pengaruh yang terjadi pada lingkungan global, nasional dan Provinsi Jambi. Agar Polri dalam jajaran Polda Jambi dapat secara tepat menyelesaikan permasalahan yang muncul, maka dituntut untuk mampu mendeteksi secara dini kerawanan yang timbul dan bersumber dari berbagai aspek kehidupan masyarakat adalah sebagai berikut :

a) Ideologi

- (1) Di wilayah Propinsi Jambi bagi Orpol dan Ormasnya masih sepenuhnya mendasari cara berpikir/pandangan dan menghayati Pancasila sebagai satu-satunya Idiologi Bangsa,

namun ada beberapa kelompok kecil yang terindikasi memberikan doktrin terhadap ideologi lain yaitu ideologi berdasarkan agama tertentu atau khilafah.

- (2) Gerakan reformasi telah membawa perubahan yang cukup besar dalam kehidupan berpolitik masyarakat daerah Jambi hal ini terlihat dari meningkatnya giat penyampaian aspirasi, unjuk rasa (Demonstrasi) khususnya yang dilaksanakan oleh kalangan Ormas, mahasiswa, karyawan/buruh, warga transmigrasi, petani dan nelayan.

b) Politik

Berdasarkan hasil Rapat Pleno penetapan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi tahun 2020 sesuai dengan ditetapkannya rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi pada Pilkada 2020 berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Jambi Nomor: 21/PL.02.6-Kpt/15/Prov/VI/2021 tentang penetapan rekapitulasi hasil Penghitungan Suara Ulang pasca putusan MK Nomor: 130/PHP.GUB-XIX/2021 dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi tahun 2020 dengan total perolehan suara di 11 Kab/Kota sebagai berikut :

- (1) Paslon 01 CE-Ratu : 587.918 (37,4%)
- (2) Paslon 02 FU-Syafril : 381.634 (24,3%)
- (3) **Paslon 03 Haris-Sani : 600.733 (38,3%)**

c) Ekonomi

- (1) Adanya permasalahan tumpang tindih lahan tambang, hutan, lingkungan, tapal batas wilayah, peraturan perundang - undangan, peraturan daerah yang kurang kondusif dan jaminan kepastian hukum dan keamanan serta gangguan kegiatan pertambangan liar (Tanpa Ijin);
- (2) Pembangunan sektor pertanian masih banyak menghadapi kendala antara lain menyusutnya lahan pertanian masyarakat akibat tergesur oleh perumahan dan

industrialisasi serta perusahaan perkebunan yang kurang mendapat dukungan dari masyarakat sehingga menimbulkan konflik antara masyarakat dengan perusahaan.

- (3) Kurangnya rasa tanggung jawab pejabat yang berwenang mengeluarkan ijin pemanfaatan sumber daya hutan, kurangnya pengawasan hutan oleh Polisi kehutanan serta lemahnya mentalitas aparat penegak hukum dalam menegakkan pelanggaran hukum dibidang kehutanan.
- (4) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan belum menjamin keseimbangan kepentingan antara pengusaha dan tenaga kerja, sehingga ada kecenderungan resistensi dari pihak pekerja untuk mendesak direvisinya undang-undang ini.
- (5) Sengketa lahan/hutan antara perusahaan dengan masyarakat masih akan terus terjadi dikarenakan tidak adanya kepastian dari pemerintah pusat maupun daerah dalam penyelesaian lahan tersebut secara tuntas.
- (6) Munculnya resistensi dari masyarakat terhadap berbagai kebijakan pemerintah karena dianggap merugikan masyarakat (kelangkaan Gas subsidi, Kenaikan TDL, BBM, dsb) serta kenaikan harga minyak goreng dan illegal drilling. Namun Gubernur Provinsi Jambi berkomitmen akan menjaga stabilitas perekonomian yang dinyatakan pada Rapat koordinasi perdagangan se Provinsi Jambi bersama Menteri Perdagangan RI pada Jumat 25 Februari 2022.
- (7) Masih terjadinya pembalakan liar (*Illegal Logging*) dikawasan Hutan Produksi maupun dikawasan Hutan Lindung/Taman Nasional yang berdampak pada kerugian atas kekayaan Negara / Daerah.
- (8) Maraknya aktifitas Pertambangan Emas Tanpa Ijin di beberapa daerah dalam Provinsi Jambi seperti Kab. Merangin, Kab. Sarolangun, Kab. Bungo, Kab. Tebo dan Kab. Batanghari masih akan terus terjadi.

- (9) Peningkatan Kuota Pertambangan Batubara di Provinsi Jambi yaitu 142 pertambangan pada 7 Kabupaten: Batanghari, Muaro Jambi, Merangin, Bungo, Sarolangun, Tebo dan Tanjab Barat

d) Sosial Budaya

- (1) Kehidupan umat beragama telah mampu mempermudah, memperluas dan mengembangkan masyarakat untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan agamanya masing-masing, namun sebagian besar masih bersifat formalistik

dan belum mampu meningkatkan keimanan dan spritualitas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara bahkan adapula yang menyimpang menjadi aliran yang dianggap sesat dan menyesatkan. Beberapa aliran kepercayaan yang dinilai sesat dan menyesatkan, meliputi :

- (a) Jamaah Ahmadiyah di tiga Kab/Kota, Kodya Jambi, Sarolangun dan Kerinci.
 - (b) Jamaah Tarikhat Naqsabandiah di Kabupaten Batanghari.
 - (c) Majelis Tafsir Alqu'an di Kabupaten Merangin dan Kabupaten Kerinci.
- (2) Masalah peningkatan kesejahteraan tenaga kependidikan terutama di daerah-daerah terpencil, serta pemeliharaan sarana dan pra sarana pendidikan masih kurang mendapat perhatian pemerintah, dihadapkan lagi pada sistem pemerataan perluasan pendidikan yang kurang baik, pola manajemen yang tidak efisien. Kurang efisien dan kurang relevannya pendidikan dengan tuntutan perubahan, proses pembelajaran yang menekankan pada pencapaian target dengan mengabaikan aspek kualitas, pola pengajaran yang masih berorientasi pada guru, rendahnya kualitas guru dan kualifikasi mengajar guru;

- (3) Masalah pertanahan akan terus menjadi permasalahan yang berkembang dimasyarakat, baik di daerah perkotaan maupun di desa-desa, pemukiman, pertanian/perkebunan maupun daerah industri. Kasus pertanahan merupakan masalah kompleks yang timbul akibat kebijakan pemerintah yang dianggap oleh sebagian masyarakat terlalu mementingkan pertumbuhan ekonomi dan hanya memberi kesempatan kepada perusahaan tertentu sebagai investor, ada dorongan dan kemudahan-kemudahan khusus untuk perusahaan tersebut, yang kini berakibat adanya korelasi positif antara pertumbuhan ekonomi itu dengan distribusi kepemilikan tanah/lahan.
- (4) Dampak wabah Covid-19 telah merubah kondisi sosial masyarakat Jambi terlebih dengan diberlakukannya New Normal, aktifitas kegiatan masyarakat masih dilakukan secara terbatas dan mentaati protokoler kesehatan Covid-19.
- (5) Penyebaran virus corona masih menjadi kendala yang harus dihadapi bersama di Indonesia khususnya di Provinsi Jambi.
- (6) Untuk mengatasi permasalahan sosial ekonomi masyarakat di tengah Covid-19 serta mencegah terjadinya konflik-konflik sosial maka pemerintah membuat jaring pengaman sosial dengan menyalurkan bantuan sosial Covid-19 yang berasal dari APBN/kementrian sosial, APBD maupun dana desa kepada masyarakat miskin/kurang mampu yang terdampak Covid-19 baik bantuan dalam bentuk sembako, PKH maupun bantuan langsung tunai sebesar Rp.600 ribu per KK per bulan selama 3 bulan yang dibagikan dalam III tahap. Namun demikian banyak muncul permasalahan dilapangan sehingga memicu konflik dan prokontra antarlain adanya pemotongan dana bantuan dari oknum aparat desa dan adanya data penerima bantuan tidak valid dimana banyak

warga yang berhak menerima bantuan tetapi tidak terdaftar sebagai penerima bantuan demikian pula sebaliknya ada warga yang golongan mampu terdata sebagai penerima bantuan sosial.

e) Keamanan

- (1) Kondisi keamanan dapat dilihat dari terjadinya gangguan Kamtibmas, gangguan Kamtibmas non pidana, gangguan Kamtibcar lintas, laka lintas yang disebabkan oleh angkutan berat batu bara dan sawit, dan situasi keamanan di masing-masing wilayah Kabupaten dan Kota dalam Propinsi Jambi.
- (2) Secara umum situasi keamanan sudah semakin kondusif khususnya di beberapa Kabupaten dalam Provinsi Jambi, namun di beberapa daerah tertentu masih terjadinya kasus-kasus yang meresahkan masyarakat seperti Curas, Curat dan Curanmor dengan menggunakan Senpi serta perkelahian antar desa atau antar kelompok masyarakat.
- (3) Dari data pengungkapan beberapa peristiwa terkait dengan aksi terorisme maupun paham radikal di Prov. Jambi bahwa kelompok atau jaringan teroris yang ada di Indonesia merekrut maupun menyebarkan pahamnya, dimana sasaran/korbannya merupakan warga Provinsi Jambi, perekrutannya menggunakan Media Sosial ataupun Internet, kelompok pelajar/mahasiswa rentan terhadap upaya-upaya indoktrinasi kelompok radikal pro kekerasan dalam melakukan menyebarkan paham radikal, mengingat mereka adalah pengguna internet aktif yang dilihat dari faktor usia maupun kemampuan berfikir dianggap masih labil.
- (4) Kebakaran hutan dan lahan hampir setiap tahun terjadi di Indonesia. Kebakaran hutan dan lahan telah mengancam aspek kehidupan manusia di tingkat lokal, nasional, regional

dan bahkan global serta terganggunya fungsi hutan, ekonomi,

pendidikan, perhubungan, kesehatan dan lingkungan hidup bahkan dapat mengancam integritas bangsa dan negara, oleh karena perlu dilakukan penanggulangan dan pencegahan sedini mungkin terjadinya Karhutla di wilayah hukum Polda Jambi.

- (5) Kasus kejahatan Curanmor yang semakin meningkat baik dari segi kuantitas maupun dari segi kualitasnya, hal ini dapat dilihat dari jumlah kerugian yang dialami korban maupun Modus Operandi yang dilakukan oleh para pelaku Curanmor, hal ini juga dipengaruhi karena adanya kemudahan masyarakat dalam memperoleh kredit kepemilikan kendaraan bermotor dengan *Down Payment* (DP) rendah/kecil karena didukung oleh Lembaga Keuangan Non Bank (*Leasing*) serta adanya jaminan penggantian biaya oleh pihak asuransi apabila kendaraan tersebut hilang/dicuri. Trend situasi Kamtibmas dari tahun ke tahun cenderung meningkat, hal tersebut disebabkan bertambahnya jumlah penduduk dalam Provinsi Jambi dan dampak dari pengaruh perkembangan lingkungan strategis, baik global, regional maupun nasional.

b. Analisis

Pelaksanaan tugas Polri masih dipengaruhi oleh berbagai faktor yang berasal dari faktor internal dan eksternal sehingga perlu untuk dilakukan identifikasi dan analisis agar dapat ditemukan langkah yang tepat dalam menyusun kebijakan dan strategi Polda Jambi yang saat ini memiliki personel yang sudah tergelar mulai dari Polda Jambi sampai dengan Polsubsektor yang telah didukung oleh sarana dan prasarana yang semakin meningkat setiap tahunnya. Hal ini tentunya perlu diimbangi dengan peningkatan kualitas profesionalisme Sumber Daya Manusia (SDM) Polri

dalam melaksanakan tugasnya, sehingga berdampak akan diusulkan kembali untuk kenaikan tunjangan kinerja Polri menjadi 80%.

Adapun kondisi eksternal yang dihadapi antara lain: gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat semakin dinamis, dapat terjadi setiap saat dan waktu sebagai dampak akibat pengaruh dari penyebaran *Covid-19*, perkembangan teknologi informasi dapat menimbulkan peluang kejahatan dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi (kejahatan Siber). Masih dijumpai adanya kecenderungan masyarakat dalam menangani masalah keamanan bertindak dengan main hakim sendiri, sehingga berdampak buruk terhadap penegakan dan kepastian hukum. *Trend* peningkatan 4 jenis kejahatan, radikalisme, korupsi, Narkoba dan *Illegal Things* (Illegal logging, Illegal Mining, Illegal Fishing, Illegal Tapping) menuntut Polri untuk lebih optimal di bidang pencegahan dan penegakan hukum. Sistem hukum dan peradilan yang tumpang tindih terkait kewenangan antar lembaga penegak hukum menimbulkan kerancuan dalam penegakan hukum di Indonesia. Semakin meningkatnya kejahatan transnasional sehingga lalu lintas orang dan barang ilegal semakin mudah dan cepat untuk dilakukan.

2. Identifikasi Masalah

Pelaksanaan tugas Polri seiring dengan perkembangan lingkungan strategi global, regional dan nasional akan semakin berat dan kompleks. Serta tuntutan dan harapan masyarakat terhadap profesionalisme kinerja Polri dan pelayanan di bidang Kepolisian oleh Polri yang semakin tinggi mengharuskan Polri Menyusun berbagai upaya dan langkah-langkah aksi yang konkret dan efektif dalam mewujudkan Kamdagri khususnya di Provinsi Jambi. Secara umum permasalahan di bidang keamanan yang akan dihadapi Polda Jambi pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- a. Pengamanan tahapan Pemilu menuju 2024 dan mendukung program pemerintah dalam membangun Ibu Kota Negara (IKN).
- b. wabah *Covid-19* dengan varian baru masih akan terus mengancam yang turut mempengaruhi keamanan dan ketertiban masyarakat;

- c. transformasi digital menjadi pendorong penting dalam respons terhadap pandemi untuk mengantisipasi risiko penularan dan memastikan penerapan jarak fisik (*physical distancing*), sementara juga memungkinkan kelangsungan layanan dan aktivitas ekonomi tertentu secara virtual. Perubahan kebiasaan seperti bekerja dan belajar jarak jauh juga menjadi norma bagi sebagian besar masyarakat;
- d. isu korupsi, pelanggaran HAM, deforestasi dan lingkungan serta kasus lahan di sejumlah tempat akan menjadi perhatian dan perbincangan pada tahun 2023;
- e. segregasi (pemisahan suatu golongan dari golongan lainnya) masyarakat berdasarkan SARA akan semakin kuat dengan adanya persiapan kontestasi Pemilu 2024;
- f. konflik SARA terjadi karena adanya perbedaan kepentingan yang dimiliki setiap kelompok yang dipengaruhi oleh rendahnya toleransi di masyarakat. Adanya kelompok identitas mengatasnamakan suku maupun golongan tertentu menjadi pemicu munculnya konflik antaretnis/suku, paham politik saat ini juga berperan dalam menciptakan kebencian antarsuku/etnis dan umat beragama sehingga memicu timbulnya tindakan kekerasan yang berujung terjadinya konflik SARA;
- g. penyebaran paham radikalisme dan intoleransi serta unjuk rasa masih akan terjadi pada tahun 2023, serta masih akan tetap menyuarakan ideologinya dan menentang keberadaan Pancasila sebagai ideologi negara yang akan mengganggu stabilitas dan keamanan nasional;
- h. menguatnya kepentingan elit politik dalam memperebutkan sumber daya alam mendorong munculnya tuntutan pemekaran wilayah untuk mendapat kekuasaan;
- i. proses globalisasi dan kemajuan iptek juga menghadirkan berbagai ancaman dari segi ideologi, politik, ekonomi dan sosial budaya, perkembangan teknologi informasi dan lemahnya penegakan hukum menyebabkan maraknya pelanggaran hak cipta melalui dunia maya (*cyber crime*) dan penyebaran informasi hoaks yang melanggar UU IT, yang perlu diantisipasi dengan penguatan Pancasila;

- j. masalah keamanan dan ketertiban serta kelancaran berlalu lintas terutama di kota-kota besar masih menyimpan berbagai permasalahan krusial, dikaitkan dengan intensitas kendaraan yang meningkat yang tidak selaras dengan perkembangan sarana jalan;
- k. gangguan Kamtibcar Lantas berupa kecelakaan, pelanggaran dan kemacetan arus lalu lintas cenderung mengalami peningkatan, sebagai dampak meningkatnya jumlah kendaraan bermotor yang tidak seimbang dengan pembangunan sarana dan prasarana jalan, serta rendahnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi rambu-rambu dan tertib lalu lintas;
- l. kurangnya pengawasan dan tanggung jawab keamanan atau keselamatan penumpang jasa angkutan udara, laut dan darat, mendorong meningkatnya angka kecelakaan yang menimbulkan korban jiwa dan kerugian materiil;
- m. percepatan teknologi digital yang sangat cepat Polri dituntut untuk mampu menjaga keamanan dari sisi siber;
- n. kejahatan yang terjadi terhadap perempuan dan anak yang masih terus ditingkatkan penanganannya secara baik sesuai SPM dan perlu penanganan khusus;
- o. penyelundupan, pencurian terhadap sumber daya alam dan perusakan lingkungan hidup masih sering terjadi dan dapat merusak ketahanan dan keamanan pangan;
- p. peredaran Narkoba, kejahatan korupsi dan terorisme, keberadaan dan kegiatan kelompok teroris masih tumbuh dan berkembang, mereka mengembangkan pola kegiatan dan sasaran secara sporadis termasuk terhadap sasaran aparat keamanan dan pejabat pemerintah, saat ini kejahatan siber serta kejahatan konvensional semakin marak dan telah pada taraf yang meresahkan masyarakat sebagai akibat adanya pandemi *Covid-19*;
- q. rendahnya kesadaran hukum masyarakat dan masih lemahnya penegakan hukum, menimbulkan kecenderungan mengabaikan aturan Undang-Undang, serta masih tingginya konflik sosial, aksi sweeping, premanisme dan tindak kejahatan yang meresahkan masyarakat;
- r. percepatan teknologi digital yang sangat cepat menuntut Polri untuk mampu menjaga keamanan dari sisi siber;

- s. masih tingginya titik kemacetan, pelanggaran dan angka kecelakaan lalu lintas terutama yang disebabkan oleh angkutan berat batubara dan sawit;
- t. kegiatan *illegal drilling* di beberapa Kabupaten dalam Provinsi Jambi.

II. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

1. Visi dan Misi Polda Jambi

a. Visi Polda Jambi:

Terwujudnya wilayah hukum Polda Jambi yang aman dan tertib.

Makna: Kepolisian Daerah Jambi mewujudkan Jambi yang aman dan tertib guna mendukung Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden “Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepentingan berlandaskan gotong – royong“

b. Misi Polda Jambi:

Melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat di wilayah hukum Polda Jambi guna memelihara kamtibmas serta menegakkan hukum yang berkeadilan.

Makna: Melindungi, Mengayomi, dan Melayani Masyarakat dalam rangka memelihara Kamtibmas dan menegakkan hukum.

2. Visi dan Misi Bidhumas Polda Jambi.

a. Visi Bidhumas Polda Jambi:

“Terwujudnya pelayanan Bidhumas Polda Jambi yang Profesional, Unggul dan Dipercaya dalam Pengelolaan Informasi Tentang Kinerja Polri ”.

b. Misi Bidhumas Polda Jambi:

1). Meningkatkan kompetensi SDM yang mampu melaksanakan tugas pokok, fungsi dan peran Bidhumas Polda Jambi dalam rangka mengelola informasi tentang kinerja Polri;

2). Meningkatkan dan menyempurnakan sistem dan metode yang dapat mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Bidhumas Polda Jambi;

3). Memenuhi dan melengkapi sarana dan prasarana penunjang dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pengemban fungsi Humas Polri baik di Pusat maupun Kewilayahan secara bertahap dan berkelanjutan;

- 4). Mengusulkan kebutuhan anggaran yang dapat mendukung pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan peran Bidhumas Polda Jambi dalam melaksanakan pengelolaan informasi tentang kinerja Polri.

3. Tujuan Jangka Menengah

a. Polda Jambi

- 1) Menjamin terpeliharanya Keamanan dan Ketertiban masyarakat di seluruh Daerah Jambi;
- 2) Menegakkan Hukum secara berkeadilan;
- 3) Modernisasi pelayanan Polri di Polda Jambi;
- 4) Mewujudkan Polri yang profesional;
- 5) Menerapkan manajemen Polri di Polda Jambi yang terintegritas dan terpercaya.

b. Bidhumas Polda Jambi

- 1). Tercapainya peningkatan kompetensi SDM yang mampu melaksanakan tugas pokok, fungsi dan peran Bidhumas Polda Jambi dalam rangka mengelola informasi tentang kinerja Polri;
- 2). Tercapainya peningkatan dan penyempurnaan system dan metode Bidhumas Polda Jambi yang dapat mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Bidhumas Polda Jambi;
- 3). Terpenuhinya kelengkapan sarana dan prasarana penunjang dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pengemban fungsi Humas Polri baik di Pusat maupun Kewilayahan secara bertahap dan berkelanjutan;
- 4). Terpenuhinya kebutuhan anggaran yang dapat mendukung pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan peran Bidhumas Polda Jambi dalam melaksanakan pengelolaan informasi tentang kinerja Polri.

4. Sasaran Prioritas

a. Polda Jambi

Sasaran Prioritas Polda Jambi Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- 1) **pertama** "Pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat";

- 2) **kedua** “Penegakan Hukum secara berkeadilan”;
- 3) **ketiga** “Profesionalisme SDM”;
- 4) **Keempat** “Modernisasi teknologi”;
- 5) **kelima** “Sistem pengawasan yang akuntabel guna mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih, terbuka dan melayani”.

b. Sasaran Prioritas Bidhumas Polda Jambi

Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam penyelenggaraan fungsi bidang Humas di lingkungan Polri maka sasaran yang diprioritaskan pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- 1) tertatanya struktur organisasi Bidhumas Polda Jambi serta terpenuhinya personel yang lebih efektif dalam rangka antisipasi tugas-tugas dibidang fungsi humas dalam memberikan pelayanan informasi, penyebaran/disemensi informasi serta Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi;
- 2) terselenggaranya pendidikan dan pelatihan dibidang fungsi kehumasan berupa kemampuan jurnalistik, publik speaking, media handling, fotografi, videografi dan desain grafis;
- 3) memberikan pelayanan informasi publik sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dengan melalui berbagai media massa baik cetak, elektronik, media social dan media online;
- 4) tersusunnya piranti lunak berupa Peraturan Kapolri dan Peraturan Kadiv Humas yang mengatur tentang mekanisme Prosedur Tetap (Protap) dibidang Fungsi Humas;
- 5) menjadikan Bidhumas Polda Jambi sebagai sumber informasi yang obyektif, dipercaya, partisipatif, responsif, humanis, transparan dan akuntabel;
- 6) melaksanakan supervisi staf pada Polda secara selektif dalam rangka peningkatan kinerja Bidhumas Polda dan Polres;
- 7). Terwujudnya kemitraan dengan seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) dalam meningkatkan citra positif Polri melalui

penyebaran/diseminasi informasi di media massa baik cetak maupun elektronik termasuk media online dan media sosial.

III. Arah Kebijakan dan Strategi Tahun 2023

1. Polda Jambi

Untuk mewujudkan pencapaian Sasaran Prioritas Polda Jambi Tahun 2023, maka ditetapkan arah kebijakan dan strategi sebagai berikut:

a. arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas **“Pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat”**, yaitu:

1) meningkatkan peran Polri dalam menjaga keamanan dalam negeri melalui peningkatan kemampuan deteksi aksi;
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

a) memetakan potensi terorisme, aksi radikal, konflik sosial, dan situasi gangguan Kamtibmas lainnya;

(giat3112,3114,3115,3116,3117,3150/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU1/PPKprog5,10,giat16,33,34,renaksi60,61,62,63,64,65,130,131);

b) melakukan Lidikpangal dengan fokus pada potensi terorisme, aksi radikal, konflik sosial dan gangguan Kamtibmas lainnya;

(giat3112,3114,3115,3116,3117,3150/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU1/PPKprog5,10,giat16,33,34,renaksi60,61,62,63,64,65,130,131);

2) menurunkan potensi kejahatan, gangguan Kamtibmas dan terorisme melalui kegiatan pencegahan yang proaktif;
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

a) melanjutkan penguatan program Polmas dengan penggelaran satu Bhabinkamtibmas satu desa/kelurahan;

(giat5076/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU1/PPKprog5,giat12,14,renaksi51,55);

- b) meningkatkan pembinaan dan penyuluhan serta sambang kepada kelompok kontra radikal dan deradikalisasi;
(giat5076/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU1/PPKprog5,giat16,renaksi65);
- c) penggalangan terhadap individu, kelompok maupun media sosial serta kerja sama dengan instansi terkait serta pemanfaatan mantan-mantan teroris yang sudah pancasilais untuk membantu menyadarkan masyarakat yang berpaham radikal;
(giat5076/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU1/PPKprog5,giat12,15,renaksi46,47,56,57,59);
- d) menguatkan deteksi aksi melalui pemetaan jaringan terorisme secara berkesinambungan dan mengantisipasi konflik antaragama yang berpotensi memunculkan radikalisme dan terorisme;
(giat3143/progLidikSidik/SP1/SS1/IKU1/PPKprog5,giat16,renaksi60,61);
- e) patroli konten dan kontra narasi pada kanal-kanal media *online* dan media sosial yang sehat menjadi saluran penyebaran propaganda kelompok teroris;
(giat3143/progLidiksidik/SP1/SS1/IKU1/PPKprog5,giat16,renaksi63);
- f) meningkatkan pelibatan peran *civil society* dan tokoh agama garis keras yang telah mengikuti program moderasi beragama dalam penanganan kasus terorisme;
(giat3143/progLidikSidik/SP1/SS1/IKU1/PPKprog5,giat16,renaksi64);
- g) melaksanakan kerja sama dan identifikasi terhadap individu atau kelompok serta melakukan sosialisasi terhadap mantan narapidana terorisme dan keluarganya;
(giat3143/progLidikSidik/SP1/SS1/IKU1/PPKprog5,giat16,renaksi65);
- h) menetralkan dan menekan isu serta berita negatif yang dapat mengganggu stabilitas Kamtibmas;

(*giat3149/progDukma/SP1/SS1/IKU1/PPKprog13,giat43,renaksi 151,152*);

- i) melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat terkait pencegahan kejahatan;
(*giat3149/progDukma/SP1/SS1/IKU1/PPKprog5,giat12,renaksi 46,51,160,161*);
 - j) meningkatkan kegiatan Patroli wilayah rawan kriminalitas;
(*giat3130/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU1/PPKprog5,giat12, renaksi48*);
 - k) meningkatkan pelacakan dan penangkalan di tempat keramaian, rawan kejahatan dan daerah perbatasan;
(*giat3130/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU1/PPKprog5,giat12, renaksi48*);
 - l) meningkatkan kegiatan patroli dan pengamanan di tempat Obvit/Obvitnas dan tempat pariwisata;
(*giat3131/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU1/PPKprog5,giat12, renaksi50,51*);
- 3) meningkatkan kegiatan "*Pemolisian Prediktif*" dalam rangka Harkamtibmas untuk mendukung penanganan *Covid-19* saat "*New Normal*" dengan melibatkan peran aktif masyarakat;
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- a) peningkatan pemberdayaan pengembalian kewenangan kepolisian terbatas kepada BUJP dan Satpam;
(*Giat5076/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU1/PPKprog5,giat21, renaksi79,80*)
 - b) peningkatan pemberdayaan pengembalian kewenangan kepolisian terbatas kepada Satpam dan Polsus;
(*giat5076/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU1/PPKprog5,giat21, renaksi79,80*);
 - c) pembinaan eksistensi FKPM/Pokdar Kamtibmas dalam rangka mengembangkan program "*kampung tangguh*" dan asistensi

penguatan KBPPP;

(giat3133/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU1/PPKprog5,giat12,renaksi46,47,51);

d) melanjutkan pelaksanaan Sosialisasi Budaya Tertib Lalu Lintas;

(giat3133/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU1/PPKprog5,6,giat12,23,renaksi49,91);

4) melaksanakan penanganan konflik secara humanis;

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

a) pemberian Penyuluhan Kontra Radikal Kepada Ormas/Komunitas guna berpartisipasi meredam gejolak sosial yang terjadi di masyarakat yang dapat menimbulkan konflik sosial;

(giat3112/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU1/PPKprog5,giat16,renaksi60,64,65);

b) mengoptimalkan peran para Bhabinkamtibmas dalam deteksi awal penanganan konflik sosial secara humanis;

(giat5076/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU1/PPKprog5,giat14,renaksi54,55);

5) meningkatkan Kamseltibcarlantas guna memberikan rasa aman di tengah masyarakat saat terjadi kemacetan dan jam rawan kejahatan; untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

a) melaksanakan pengaturan, pengawalan dan patroli Lantas;

(giat3130,3133/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU1/PPKprog5,giat12,renaksi49);

b) meningkatkan kegiatan patroli wilayah rawan kriminalitas saat jam rawan serta berperan aktif mengajak masyarakat dalam mewujudkan Kamtibmas;

(giat3130,3133/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU1/PPKprog5,8,giat12,27,28,renaksi49,107,112);

c) meningkatkan kegiatan patroli dan pengamanan di tempat Obvit/Obvitnas dan tempat pariwisata saat jam rawan dalam

rangka mendukung *PEN* serta berperan aktif masyarakat dalam mewujudkan Kamseltibcarlantas;
(*giat3133/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU1/PPKprog5,8,giat12,27,renaksi49,50,107*);

- 6) meningkatkan peran aktif dan kehadiran Polri di wilayah rawan gempa dan bencana;
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
 - a) personel Brimob Polri yang mampu digerakkan dalam menghadapi ketanggapsegeraan serta membangun sinergisitas kemitraan dengan *stakeholders* dalam penanggulangan bencana, keselamatan dan reintegrasi di wilayah rawan serta wabah;
(*giat5087/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU1/PPKprog5,giat19,20,32renaksi74,78,129*);
 - b) menyelenggarakan pelayanan bantuan kegiatan penanganan SAR terbatas oleh personel Sabhara, Brimob dan bantuan Satwa;
(*giat3130,5081,5087/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU1/PPKprog5,giat19,20,32renaksi74,78,129*);
 - c) memetakan masyarakat desa/wilayah rawan gempa dan bencana oleh Bhabinkamtibmas guna memudahkan identifikasi masyarakat saat dan pascabencana;
(*giat5076/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU1/PPKprog9,giat30,renaksi123*);
 - d) Bersama instansi terkait bekerja sama dalam penanganan pelayanan kesehatan pada daerah rawan gempa dan bencana;
(*giat3072,5076/progDukma,4/SP1/SS1/IKU1/PPKprog5,giat32,renaksi31,129*);
- 7) melaksanakan pengamanan tahapan Pemilu 2024;
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

- a) pembinaan pelayanan fungsi Sabhara;
(*giat,3130/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU1/PPKprog5,giat18,renaksi70*);
 - b) penyelenggaraan pengamanan objek vital;
(*giat3130,3131,3135/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU1/PPKprog5,giat18,renaksi70*);
 - c) penanggulangan keamanan dalam negeri;
(*giat5087/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU1/PPKprog5,giat18,renaksi70*);
 - d) pembinaan operasi kepolisian;
(*giat5079/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU1/PPKprog5,giat18,renaksi70*);
 - e) penindakan tindak pidana umum;
(*giat3142/progLidikSidik/SP1/SS1/IKU1/PPKprog5,giat18,ren aksi70*);
- b. arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas **“Penegakan Hukum secara berkeadilan”**, yaitu:
- 1) meningkatkan profesionalisme penyidik dalam penanganan dan penyelesaian tindak pidana guna memenuhi rasa keadilan masyarakat; untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
 - a) melakukan penyelidikan yang berhubungan dengan hakikat ancaman tindak pidana terorisme, penindakan serta penyidikan tindak pidana terorisme berdasarkan penghormatan terhadap HAM sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
(*giat3143/progLidikSidik/SP3/SS2/IKU2/PPKprog5,6,giat16,23,ren aksi60,61,94,95*);
 - b) meningkatkan pemberantasan 4 (empat) jenis kejahatan dengan prioritas tindak pidana korupsi (pencegahan dan *asset recovery*), narkoba (TPPU), Terorisme, Karhutla/LH serta siber termasuk kejahatan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
(*giat3140,3142,3143,3144,3151,3145,3146,5083,progLidikSidik/SP3/SS2/IKU2/PPKprog6,giat23,renaksi85,86,87,88,94,95,98*);

- c) meningkatkan penegakan hukum terhadap kejahatan ekonomi di bidang pangan, pertanahan, energi, investasi/perbankan (sektor keuangan);
(*giat3145/progLidikSidik/SP3/SS2/IKU2/PPKprog6,giat23,renaksi86*);
 - d) melaksanakan penyelesaian perkara melalui *Restorative Justice* yang tidak hanya melihat aspek kepastian hukum namun pada kemanfaatan dan keadilan;
(*giat3140/progLidikSidik/SP3/SS2/IKU2/PPKprog6,giat23,Ren aksi84*);
 - e) penanganan kejahatan pada ruang siber (*cyber crime*) yang mengedepankan kualitas dan edukasi masyarakat;
(*giat3151/progLidikSidik/SP3/SS2/IKU2/PPKprog6,giat23,ren aksi88*);
 - f) meningkatkan penindakan hukum terbatas/Tipiring;
(*giat3130,5083/progLidikSidik/SP3/SS2/IKU2/PPKprog6,giat23,renaksi92,93*);
 - g) mempercepat penyelesaian perkara-perkara khususnya yang menjadi perhatian publik serta memberikan kepastian hukum dan menghindari penyidikan yang berlarut-larut serta transaksional;
(*giat3141,3140/progLidikSidik/SP3/SS2/IKU2/PPKprog6,giat23, Renaksi89,90*);
 - h) memberikan bantuan teknis penyidikan dalam pengolahan TKP dan pemeriksaan barang bukti
(*giat3141/progLidikSidik/SP3/SS2/IKU2/PPKprog6,giat23,ren aksi96*);
- 2) melaksanakan sertifikasi penyidik guna meningkatkan kemampuan penyidik di era 4.0;
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- a) melaksanakan sertifikasi bagi penyidik Polri;
(*giat3100/progProfesionalismeSDMPolri/SP3/SS3/IKP1/PPK prog6,giat23,renaksi93*);
 - b) meningkatkan kemampuan pemeriksa forensik (Labfor dan Inafis) dalam pengelolaan TKP;

*(giat3100/progProfesionalismeSDMPolri/SP3/SS3/IKP2/PPK
prog6,giat23,renaksi93,96);*

3) mewujudkan proses penyidikan yang efektif guna menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam penegakan hukum yang memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat;
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

a) memberikan SP2HP2 kepada pembuat pengaduan masyarakat guna meminimalisir komplain dari masyarakat kepada Polri di bidang penegakan hukum menjunjung tinggi HAM kepada pelapor/korban dan tersangka;

*(giat3137,5086/progLidikSidik/SP3/SS2/IKU2/PPKprog16,giat51
renaksi176,177);*

b) mengoptimalkan peran pengawasan melekat atasan penyidik dan peran Bagwassidik guna mengawasi proses penyidikan agar berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

*(giat5086/progLidikSidik/SP3/SS2/IKU2/PPKprog14,giat47,ren
aksi162,163);*

c. arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas “**Profesionalisme SDM**”, yaitu:

1) meningkatkan kualitas 8 standar pendidikan era *police* 4.0;
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

a) melanjutkan penataan kurikulum yang meliputi 70% praktik dan 30% teori pada seluruh pendidikan, baik Diktuk, Dikbang dan Dikbangum;

*(giat5070/progProfesionalismeSDMPolri/SP4/SS3/IKP3b/PPK
prog3,giat4,renaksi13,14);*

b) *upgrading* dan sertifikasi gadik/instruktur;

*(giat3100/progProfesionalismeSDMPolri/SP4/SS3/IKP3b/PP
Kprog3,giat4,renaksi11,13,14);*

- c) pelaksanaan latihan harkatpuan fungsi Dalmas dan Negosiator yang *Worldclass Standar*, (*giat3100/progProfesionalismeSDMPolri/SP1/SS1/IKU3b/PPKprog3,giat4,Renaksi14*);
 - d) pelatihan penanganan konflik secara humanis bagi anggota Brimob, Samapta dan Binmas yang “*Worldclass Standar*”; (*giat3100,5076,3130,5087/progProfesionalismeSDMPolri,Harkamtibmas/SP4/SS3/IKP3b/PPKprog3,giat4renaksi14,16*);
 - e) sertifikasi profesi anggota Polri serta meningkatkan sertifikasi jumlah penyidik Ditpolair dan Ditlantas Polri; (*giat3100/progProfesionalismeSDMPolri/SP4/SS3/IKP3b/PPKprog6,giat23,renaksi93*);
 - f) desentralisasi pendidikan pengembangan spesialisasi untuk fungsi teknis Binmas, Intelijen dan Sabhara ke SPN Polda; (*giat3100/progProfesionalismeSDMPolri/SP4/SS3/IKP3b/PPKprog3,giat4,renaksi13*);
 - g) pelatihan manajemen operasional Polsek yang *Worldclass Standar*; (*giat3100/progProfesionalismeSDMPolri/SP4/SS3/IKP3b/PPKprog3,giat4,renaksi14*);
- 2) mengoptimalkan penggunaan aplikasi Analisis Beban Kerja (ABK), SIK3 dan pengembangan struktur organisasi Polri; untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- a) mengoptimalkan aplikasi SI-ABK dalam penataan Daftar Susunan Personel (DSP) di setiap Satker; (*giat5052/progDukma/SP4/SS5/IKP5d/PPKprog2,giat3,renaksi6,7*);
 - b) pengembangan struktur organisasi Polri pada tingkat Satuan Kewilayahan dengan mengoptimalkan penggunaan aplikasi SIK3; (*giat5052/progDukma/SP4/SS5/IKP5d/PPKprog1,giat1,2,renaksi2,3,4*);
 - c) mengoptimalkan aplikasi SI-ABK dalam penataan Daftar Susunan Personel (DSP) di setiap Satker guna pengembangan organisasi

Polri dengan melakukan kajian kelembagaan, baik bidang pembinaan maupun bidang operasional; (*giat5052/progDukma/SP4/SS5/IKP5d/PPKprog2,giat3,renaksi6, 7*);

- 3) meningkatkan SDM Polri yang unggul di era *Police 4.0*; untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
 - a) melaksanakan rekrutmen anggota Polri secara proaktif dan terpadu berbasis T.I (*Affirmative Action, Talent Scouting dan Reward*); (*giat3107/progProfesionalismeSDMPolri/SP4/SS3/IKP3a/PPKprog3,giat4,renaksi8,9*);
 - b) merencanakan seleksi Dikbang pegawai negeri pada Polri sesuai dengan ketersediaan anggaran yang ada untuk meningkatkan kompetensinya tahun 2023
(*giat3107/progProfesionalismeSDMPolri/SP4/SS3/IKP3a/PPKprog3,giat4,renaksi11*);
 - c) meningkatkan kemampuan/*skill* Bhabinkamtibmas dan pengemban Polmas dalam menangani konflik sosial secara humanis yang terjadi dimasyarakat di bidang Kamtibmas; (*giat3100,5076/progProfesionalismeSDMPolri,Harkamtibmas/SP3/SS3/IKP3b/PPKprog3,giat4,renaksi16*);
- 4) meningkatkan pengelolaan SDM yang humanis; untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
 - a) melanjutkan pengembangan Aplikasi Sirena secara bertahap agar lebih aplikatif; (*giat3084,4339/progAlmatusSarprasPolri,Dukma/SP4/SS4/IKP4b/PPKprog4,giat9,renaksi33,34*);
 - b) melanjutkan pengembangan sarana dan prasarana teknologi informasi, baik *hardware* maupun *software* untuk mendukung aplikasi *e-planning* dan *e-budgeting*; (*giat3084/prog2/SP4/SS4/IKP4b/PPKprog4,giat9,renaksi33,34*);

- c) pengadaan barang dan jasa di lingkungan Polri melalui LPSE sesuai peraturan yang berlaku;
(giat4341/progModernisasiAlmatusSarprasPolri2/SP4/SS4/IKP4 d/PPKprog3,giat4,renaksi11,14);
- d) melaksanakan pelatihan dan ujian sertifikasi pengadaan barang/jasa pemerintah;
(giat3100,4341/progProfesionalismeSDM,progModernisasiAlmatus SarprasPolri/SP4/SS3/IKP3a/PPKprog3,giat4,renaksi13,14);
- e) peningkatan kemampuan kedokteran dan kesehatan serta keterampilan bagi personel Biddokkes;
(giat3072,3100/progDukma,ProfesionalismeSDM/SP4/SS3/IKP3a/ PPKprog3,giat4,renaksi11,14);
- 5) melaksanakan sistem manajemen karier berbasis kinerja; untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- a) menyempurnakan standar penilaian kompetensi serta meningkatkan “*sistem reward and punishment*”;
(giat3108/progProfesionalismeSDMPolri/SP4/SS3/IKP3a/PPK prog3,giat5,renaksi23);
- b) membangun sistem penilaian kompetensi Polri (*kompetensi teknis, kompetensi kepemimpinan dan kompetensi etik*) yang komprehensif melingkupi perencanaan, pelaksanaan, *monitoring* dan evaluasi guna mendukung “*program manajemen talenta*”;
(giat3108/progProfesionalismeSDMPolri/SP4/SS3/IKP3a/PPK prog3,giat5,renaksi22);
- c) optimalisasi Sistem Manajemen Kinerja *online* dengan SIPP;
(giat3108/progProfesionalismeSDMPolri/SP4/SS3/IKP3a/PPK prog3,giat5,renaksi18,20,21);
- d) meningkatkan jumlah asesor sertifikasi kompetensi bidang Satpam dan Polsus;
(giat3100,3108,5076/progProfesionalismeSDMPolri,Harkamtibmas/ SP4/SS3/IKP3a/PPKprog3,giat4,ren aksi13);

- 6) meningkatkan kesejahteraan melalui layanan kesehatan, perumahan dan keselamatan kerja bagi aparaturnya Polri;
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- a) meningkatkan pelayanan administrasi berkaitan dengan BPJS dan Asuransi Jamkestama;
(giat3072/progDukma/SP4/SS5/IKP5e/PPKprog3,giat8,renaksi 30,31,32);
 - b) mengoptimalkan pelayanan secara proaktif dalam pemberian tanda kehormatan kepada pegawai pada Polri yang gugur/tewas dalam tugas; *(giat3072,3105/progDukma,progProfesionalismeSDMPolri/SP4/SS3/IKP5e/PPKprog3,giat8,renaksi32);*
 - c) melaksanakan pelayanan administrasi pegawai pada Polri berkaitan dengan Asabri;
(giat3105/progProfesionalismeSDMPolri/SP4/SS3/IKP5e/PPK prog3,giat8,renaksi29);
 - d) peningkatan standar akreditasi rumah sakit Bhayangkara melalui standar nasional akreditasi rumah sakit (SNARS);
(giat3072,5062/progDukma,progAlmatsusSarprasPolri/SP4/SS3/ IKP3a/PPKprog4,giat10,renaksi31,103);
- d. Arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas “**Modernisasi teknologi**”, yaitu:
- 1) memenuhi sarana dan prasarana dan Almatsus Polri yang modern guna mendukung peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat;
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
 - a) melanjutkan pembangunan ruang RPK di Polres dan Polsek sesuai dengan SPM yang terintegrasi secara *online*;
(giat5062,3071/progModernisasiAlmatsusSarprasPolri,progDukma/ SP5/SS4/IKP4b/PPKprog4,giat9,10,renaksi 34,39,40);

- b) pemenuhan Almatusus Polri yang modern berbasis teknologi informasi guna mendukung penggelaran operasional dalam rangka penanganan PPA, penyelidikan, pengindraan, ungkap kasus, pengamanan unjuk rasa, konflik sosial, lawan insujensi dan pemeliharaan keamanan;
(*giat5060,3084/progModernisasiAlmatususSarprasPolri/SP5/SS4/IKP4b/PPKprog4,11,giat9,10,37,40,ren aksi34,37,38,135,144*);
- c) pemenuhan peralatan dan materiil registrasi dan identifikasi Fungsi Lalu Lintas yang berbasis teknologi serta melanjutkan pembangunan BPKB dan STNK online;
(*giat5060,3084,3133/progModernisasiAlmatususSarprasPolri,prog Harkamtibmas/SP5/SS4/IKP4b/PPKprog11,giat40,renaksi141*);
- d) melanjutkan pembangunan *Regional Traffic Managemen Center (RTMC)/Traffic Managemen Center (TMC)*;
(*giat5060,5062,3133/progModernisasiAlmatususSarprasPolri2,prog Harkamtibmas/SP5/SS4b/IKP4b/PPKprog4,12,giat10,41,renaksi 38,145*);
- e) melanjutkan pembangunan/pemasangan e-TLE guna menegakkan hukum secara transparan di jalan raya;
(*giat5060,3084,3133/progModernisasiAlmatususSarprasPolri2, progHarkamtibmas/SP5/SS4/IKP4b/PPKprog6,giat23,renaksi91*);
- f) pembangunan dan meningkatkan Faskes dalam rangka pelayanan kesehatan, baik pada tingkat pusat maupun wilayah untuk memberikan layanan kesehatan yang prima kepada aparaturnya Polri dan masyarakat umum;
(*giat5060,5062/progModernisasiAlmatususSarprasPolri/SP5/SS4/IKP4b/PPKprog3,giat8,renaksi 30,31*);
- g) mengintegrasikan sistem informasi kepolisian dari tingkat Polsek sampai tingkat Mabes Polri serta jaringan Palapa Ring dari Kemenkominfo RI untuk koneksi Polda-Mabes;
(*giat5060,3071/progDukma,progModernisasiAlmatususSarpras Polri/SP5/SS4/IKP4d/PPKprog4,giat9,renaksi34*);

- h) melanjutkan pengembangan 110; (*giat3084,5055,5067/progDukma,progModernisasiAlmatsusSar prasPolri/ SP5/ SS4/ IKP4a/ PPKprog4,giat9,renaksi36*);
 - i) mengoptimalkan Binmas *online* sistem yang berkoneksi dengan *online single submission* dalam penerbitan surat izin operasional BUJP; (*giat5060,3084,3071/progModernisasiAlmatsusSarprasPolri/SP 5/SS4/IKP4b/PPKprog5,giat14,renaksi54*);
 - j) pemenuhan peralatan penanganan Karhutla dan Banjir sesuai dengan karakteristik wilayah. (*giat5060,3084/ prog2/ SP5/SS4/ IKP4b/ PPKprog4,giat10,renaksi 37,38*);
- 2) meningkatkan peran Badan Usaha Milik Negara Industri Strategis (Bumnis) dan industri swasta nasional dalam pemenuhan Almatsus Polri; untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- a) melakukan kerja sama dengan BUMNIS dan Industri Swasta Nasional (ISN) dalam pembuatan purwarupa, berikut melakukan standardisasi dan Sertifikasi Alpahankam untuk keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas); (*giat5060/progModernisasiAlmatsusSarprasPolri/SP5/SS4b/IKP4/ PPKprog5,giat20,renaksi41,78*);
 - b) menggunakan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) dalam setiap pelaksanaan Pengadaan Almatsus dan Alsus Polri; (*giat4341/prog2/SP5/SS4/IKP4b/PPKprog5, giat20,renaksi78*);
- 3) pemenuhan rumah dinas pegawai Polri serta pembangunan fasilitas perkantoran dan rumah dinas; untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- a) melaksanakan pembangunan rumah dinas, flat dan Rusun bagi personel Polri; (*giat5062/progModernisasiAlmatsusSarprasPolri/SP5/SS4/IKP4/ PPKprog3,giat8,renaksi29*);

- b) melanjutkan pembangunan rumah sakit atau layanan kesehatan lainnya yang dekat dengan tempat tinggal personel dan masyarakat guna mendukung “Reformasi Sistem Kesehatan Nasional”;
(giat5062/progModernisasiAlmatsusSarprasPolriSP5/SS4/IKP4b/PPKprog3,giat8,renakasi31);
- c) melanjutkan pembangunan Fasilitas Perkantoran dan Rumdin guna mempercepat pembangunan secara selektif prioritas dan berkelanjutan;
(giat5062/progModernisasiAlmatsusSarprasPolri/SP5/SS4/IKP4b/PPKprog4,5,giat10,12,renaksi38,48);
- 4) membangun dan menyatukan sistem informasi kepolisian yang terintegrasi; untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- a) melaksanakan pengadaan sistem informasi kepolisian yang terintegrasi;
(giat3084/progModernisasiAlmatsusSarprasPolri/SP5/SS4/IKP4/PPKprog4a,giat9,renaksi34);
- b) melanjutkan penataan infrastruktur layanan darurat/hotline kepolisian dengan nomor tunggal dalam rangka merespons dengan cepat pengaduan masyarakat;
(giat5055,5062/progDukma,progModernisasiAlmatsusSarprasPolri/SP5/SS1,4/IKP4a/PPKprog4a,giat9,renaksi36);
- c) mengembangkan teknologi kepolisian berdasarkan hasil penelitian;
(giat3084,5062/progModernisasiAlmatsusSarprasPolri/SP5/SS4/IKP4/PPKprog4c,giat11,renaksi41,42);
- e. Arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas **“Sistem pengawasan yang akuntabel guna mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih, terbuka dan melayani”**, yaitu:
- 1) menguatkan penanganan publik komplain secara efektif dan terpercaya berbasis *online*;

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

- a) klarifikasi penanganan pengaduan masyarakat secara terpadu;
(*giat3091,3089,3090/progDukma/SP6/SS5/IKP5g/PPKprog12, giat42, Ren aksi150*);
- b) mengoptimalkan kerjasama sistem penanganan pengaduan masyarakat secara *online* terpadu dan berbasis TI;
(*giat3091,3090,3089,3120/progDukma,progHarkamtibmas/SP6/SS5/IKP5g/PPKprog15,giat50,Renaksi174*);
- c) percepatan penyelesaian pengaduan masyarakat yang berasal dari pengawas *eksternal*;
(*giat3091/progDukma/SP6/SS5/IKP5g/PPKprog15,giat49, Ren aksi172*);
- d) pemasangan perangkat keras (*Hardware*) dan perangkat lunak (*Software*) terkait rekrutmen Pendidikan pembentukan serta terkait penanganan perkara pidana dan pelayanan publik;
(*giat3091/progDukma/SP6/SS4,5/IKP4b/PPKprog15,giat50Ren aksi175*);

2) mengoptimalkan Saber Pungli di lingkungan internal Polri;

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

- a) penerapan Perpol Nomor 2 Tahun 2022 tentang Waskat segera sampaikan ke Fungsi Propam Polda dan Polres jajaran dengan pedoman setiap pelaksanaannya guna memaksimalkan upaya pencegahan dan mitigasi pelanggaran anggota Polri;
(*giat3090/progDukma/SP6/SS5/IKP5g/PPK/PPKprog15,giat48Ren aksi168*);
- b) meningkatkan sinergisitas Pokja Satgas Saber Pungli, Pokja UPP K/L dan Pokja UPP Pemda dalam memberantas pungli;
(*giat3091/progDukma/SP6/SS5/IKP5g/PPK/PPKprog15,giat48Ren aksi169*);
- c) membangun sistem pelaporan yang terintegrasi antara Satgas dan UPP;
(*giat3091/progDukma/SP6/SS4/IKP4b/PPKprog15,giat48, Renaksi, 168,169*);

- d) meningkatkan kerja sama dengan pihak-pihak terkait dalam mencegah pungli;
(giat3091/progDukma/SP6/SS5/IKP5e/PPKprog15,giat49Ren aksi170,172);
 - e) mendorong pelaksanaan pelayanan publik secara online;
(giat3091/progDukma/SP6/SS5/IKP5e/PPKprog11,giat37Ren aksi135);
 - f) melaksanakan pengamanan guna memperkuat kehadiran fungsi Propam pada tempatrawan pelanggaran, baik kegiatan, personel dan baket;
(giat3089,3090/prog5/SP6/SS5/IKU5g/PPKprog15,giat48,Renaksi 168,169);
 - g) pelaksanaan operasi bersih terkait penanganan perkara pidana dan pelayanan publik;
(giat3089,3090/progDukma/SP6/SS5/IKU5g/PPKprog16,giat51, Renaksi 176, 177);
 - h) terlaksananya Saber Pungli secara optimal dengan sasaran pungutan liar yang terjadi pada lingkungan Polri;
(giat3089,3090/progDukma/SP6/SS5/IKP5g/PPKprog15,giat48, Renaksi169);
- 3) meningkatkan kegiatan pencegahan korupsi di internal Polri; untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- a) meningkatkan sinergi dan kolaborasi dengan lembaga pemeriksa eksternal serta aparat penegak hukum dalam upaya pencegahan korupsi; *(giat3089,3090,3091/progDukma/SP6/SS5/IKP5d/PPKprog15,giat 49,Renaksi170,173);*
 - b) meningkatkan kualitas dan kapabilitas APIP dalam upaya mengurangi dan mencegah terjadinya korupsi;
(giat3068,3091/progDukma/SP6/SS5/IKP5b/PPKprog15,giat48,Ren aksi 168,169);
 - c) melanjutkan sosialisasi Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta

Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengendalian Gratifikasi pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;
(*giat3091/progDukma/SP6/SS5/IKP5d/PPKprog14,giat47,Ren aksi165*);

- 4) meningkatkan tatakelola manajemen kinerja perencanaan dan penganggaran Polri yang akuntabel;
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
 - a) meningkatkan pengawasan dan evaluasi dalam perencanaan dan penganggaran Satker agar lebih efektif dan efisien;
(*giat4339/progDukma/SP6/SS5/IKP5f/PPKprog15,giat48,Renaksi168,175*);
 - b) meningkatkan koordinasi, sinergi serta komitmen antara fungsi pengawasan, fungsi perencanaan, fungsi logistik, fungsi keuangan dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) selaku penanggung jawab tatakelola keuangan pada tingkat Satker;
(*giat3068,3091/progDukma/SP6/SS5/IKP5c/PPKprog15,giat48, Renaksi168*);
 - c) melaksanakan *monitoring* dan evaluasi serta sosialisasi terhadap capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Polri semester dan tahunan;
(*giat3068,4339,3091/prog1/SP6/SS5/IKP5f/PPKprog14,giat47, Renaksi163*);
 - d) melaksanakan Analisis dan Evaluasi Kinerja dan anggaran baik di bidang Pembinaan dan Operasional;
(*giat3068,4339,3091/progDukma/SP6/SS5/IKP5f/PPKprog14, giat47, Renaksi162*);
- 5) menata kelembagaan dan tata laksana Polres, Polsek dan Polsubsektor serta penguatan struktur organisasi Polri agar efektif dan efisien;
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
 - a) pemenuhan satu Kecamatan satu Polsek secara bertahap serta mengubah kewenangan Polsek hanya untuk Harkamtibmas pada

- daerah tertentu (tidak melakukan penyidikan);
(giat5052/progDukma/SP6/SS5/IKP5d/PPKprog1,giat1,Renaksi 1,2);
- b) penguatan organisasi satuan kewilayahan sesuai dengan situasi Kamtibmas dan perkembangannya;
(giat5052/progDukma/SP6/SS5/IKP5d/PPKprog1,giat1,Ren aksi3);
- 6) meningkatkan kualitas pelayanan publik Polri melalui pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Polri;
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- a) menyelenggarakan bimbingan kepada unit penyelenggara pelayanan publik di seluruh unit kerja Polri untuk memedomani kebijakan Forum Konsultasi Publik (FKP), sebagai wadah menampung aspirasi dari seluruh masyarakat/*stakeholder* terkait kebijakan penyelenggaraan layanan publik yang diberikan oleh Polri, dalam rangka evaluasi kebijakan layanan guna mewujudkan kebijakan dan penyelenggaraan pelayanan publik yang efektif, efisien berdasarkan aturan yang berlaku (terukur) dan sesuai tuntutan kebutuhan masyarakat;
(giat5053/progDukma/SP6/SS5/IKP5d/PPKprog11,giat38,Ren aksi 139,140);
- b) melanjutkan kegiatan asistensi penyelenggaraan pelayanan Publik di seluruh unit pelayanan publik Polres/Polresta/Polrestabes dan Polres Metro, sesuai dengan komponen standar pelayanan di dalam UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dalam rangka perbaikan unit pelayanan publik dan peningkatan indeks pelayanan publik Polri;
(giat5053/progDukma/SP6/SS5/IKP5d/PPKprog11,giat138,Ren aksi140);
- c) melakukan bimbingan dalam keikutsertaan inovasi-inovasi Polri yang memenuhi syarat ke dalam ajang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP), agar lebih banyak peserta dari Polri yang

berpartisipasi, sehingga lebih besar peluang untuk memperoleh kategori TOP 99/45 inovasi pelayanan publik; (*giat5053/progDukma/SP6/SS5/IKP5d/PPKprog11,giat38,Renaksi 136,139,140*);

- d) mempertahankan capaian Satker/Satwil Zona Integritas yang sudah berpredikat WBK dan WBBM dan peningkatan jumlah capaian Satker/Satwil Zona Integritas berpredikat WBK dan WBBM; (*giat5053/progDukma/SP6/SS5/IKP5d/PPKprog11,giat39,Ren aksi140*);
- e) melaksanakan pengukuran kinerja dengan Indeks Tata Kelola (ITK) Polri berbasis *web* dan *mobile* secara *online* (ITK-O) tingkat Polres Metro/Polrestabes/Polresta/Polres dan Satker Polda; (*giat5053/progDukma/SS5/IKP5d/PPKprog11,12,giat39,41,Ren aksi146*).

2. Arah kebijakan dan Strategi Bidhumas Polda Jambi Tahun 2023

Untuk mewujudkan pencapaian sasaran prioritas Bidhumas Polda Jambi Tahun 2023, maka ditetapkan Arah Kebijakan dan Strategi sebagai berikut :

- a. Arah Kebijakan dalam rangka mencapai Sasaran Prioritas “tertatanya struktur organisasi Bidhumas Polda Jambi serta terpenuhinya personal yang lebih efektif”, yaitu :
 - 1). mengedepankan Humas sebagai “ *Front Office*” yang berperan sebagai penjuror pencitraan yang profesional, transparan dan akuntabel berbasis *Information and Communication Technology* (ICT) yang tertata dalam system informasi terintegrasi (*networking*) dan terjalin dalam hubungan kemitraan sejajar serta menerima dan menyalurkan pengaduan, kritik, saran/masukan, dan aspirasi masyarakat dalam rangka pencitraan positif Polri; (SS1/ IKP1);
 - 2). Meningkatnya kuantitas dan kualitas sumber daya manusia lembaga Humas Polri melalui pendidikan dan pelatihan baik secara formal maupun non formal;(*giat3073/prog1*);
 - 3). Melaksanakan pembangunan/pemenuhan sarana dan prasarana pengelola informasi dan dokumentasi berbasis teknologi mulai dari

tingkat pusat sampai dengan pelayanan terdepan (Polsek) secara bertahap dan berkesinambungan;

- 4). Pemenuhan dan peningkatan Pagu Anggaran sesuai kebutuhan ideal bagi terselenggaranya program dan kegiatan Humas Polri yang professional, transparan dan akuntabel; (giat5059,3073,3070,3149,5056/prog1,2);
- 5). Pemanfaatan sumber daya secara optimal, baik sumber daya manusia, sarana prasarana, maupun anggaran pada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi bidang Humas; (SS1/,IKP1,2,3,4);
- 6). Penguatan dan pengembangan organisasi Humas Polri di tingkat pusat dan kewilayahan sesuai dengan beban tugas, tuntutan tugas dan lingkungan strategis; (SS1/,IKP1,2,3,4);
- 7). meningkatkan kompetensi personel bidang Humas sampai dengan tingkat terdepan/ujung tombak Polsek (Sihumas); (giat3073/prog2);
- 8). peningkatan pembinaan karier personel Humas didasarkan pada kaderisasi, kompetensi fungsi Humas dan prioritas mendapatkan kesempatan pendidikan pengembangan serta promosi jabatan;
- 9). memanfaatkan dan meningkatkan peran serta media massa serta pemangku kepentingan dalam rangka membangun opini positif dan pencitraan positif organisasi Polri; (giat 3073, 3070 /prog2 /SS1 /IKP1 / PPKprog13/giat44/Renaksi154,155,156);
- 10). terbangunnya kemitraan dengan instansi terkait dalam dan luar negeri (K/L dan Non K/L) dalam penyelenggaraan dan pengembangan bidang fungsi Humas;

- 11). meningkatkan mutu pelayanan dan kinerja yang mewujudkan pelayanan prima sesuai dengan tuntutan dan harapan masyarakat dan kebutuhan organisasi Polri; (giat5059,3073,3070,3149,5056/prog1,2/SS1/,IKP1,2,3,4);
- 12). terbitnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mendorong Polri lebih profesional, transparan, demokratis dan akuntabel dalam penyebaran/ disemniasi informasi publik; (giat3149,5056/prog2/SS1/IKP1);
- 13). peningkatan kapasitas dan kapabilitas fungsi Humas yang siap menghadapi kondisi kontinjensi Kamtibmas, kejadian luar biasa melalui pengelolaan strategi komunikasi dan informasi serta siap pada berbagai operasi kepolisian di dalam maupun luar negeri, untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan ;
 - a). mengembangkan kemampuan dan kekuatan Personel dengan mengimplementasikan manajemen SDM Humas Polri yang berbasis kompetensi untuk mewujudkan personel yang profesional, modern dan bermoral serta terpenuhinya kebutuhan SDM seluruh jajaran Humas Polri secara proporsional dan bertahap;
 - b). meningkatkan profesionalisme dan integritas penanggung jawab dan pelaksana manajemen program dan anggaran serta pengawasan dan pengendalian internal yang efektif secara berjenjang dan berkelanjutan;
 - c). pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana bidang pengelolaan informasi dan dokumentasi yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi di tingkat pusat sampai kewilayahan, dalam rangka penerapan UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; (giat3073/prog2/ SS1/IKP1,2,3,4);

- d). pengelolaan barang milik negara sesuai dengan Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Keuangan Barang Milik Negara (SIMAK BMN);
- e). pembangunan dan internalisasi budaya organisasi termasuk budaya pelayanan Humas Polri hingga ke tingkat Bidhumas Polda, Polres dan Polsek disertai dengan upaya *reward and punishment*;
- f). mengembangkan sistem dan prosedur Bidhumas yang mampu mewujudkan manajemen Bidhumas yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel melalui pembuatan produk Peraturan-peraturan; (SS1/IKP1);
- g). analisa dan evaluasi pengembangan organisasi, sistem dan metoda, serta manajemen secara berkesinambungan; (giat3073/Prog2/SS1/IKP1,2,3,4);
- h). membangun dan meningkatkan layanan pemerataan penyebaran/diseminasi informasi dalam rangka menciptakan opini positif Polri melalui kemitraan dengan media massa; (giat 3073,3070/prog2/SS1/IKP1/PPKprog13/giat44/Renaksi154,155,156);
- i). melaksanakan kerjasama dengan para pemangku kepentingan di bidang komunikasi khususnya media massa baik cetak, elektronik dan media online serta media sosial; (giat 3073,3070 /prog2/SS1 /IKP1 /PPKprog13 /giat44/Renaksi154,155,156);
- j). meningkatkan kerjasama dengan stakeholder terkait dibidang fungsi Humas melalui berbagai pelatihan dan ketrampilan;(giat3073/prog2/SS1/IKP1,2,3,4);

- k). membangun dan mengembangkan sarana, prasarana serta kemampuan Bidhumas untuk mendukung tugas operasional kepolisian;
- l). Meningkatkan kemampuan personel dalam pelaksanaan tugas-tugas peliputan sebagai bahan dokumentasi dan publikasi sekaligus sebagai bantuan teknologi dalam penyelidikan dan penyidikan;(giat3073/prog2/PPK42/prog12/renaksi148,149,150);
- m). meningkatkan data base yang mampu untuk menyajikan layanan informasi dan dokumentasi tentang kinerja Polri kepada internal dan eksternal Polri; (giat3073/prog2/PPK42/prog12/renaksi148,149,150);
- n). mengembangkan dan peremajaan sarana dan prasarana PID yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Polri; (giat3073/prog2/PPK42/prog12/renaksi148,149,150).

IV. Program, Kegiatan dan Pagu Indikatif Bidhumas Polda Jambi T.A. 2023

1. Program, Tujuan dan Kegiatan

a. Program Dukungan Manajemen

1). Tujuan:

Terwujudnya *good governance* dan *clean government* melalui peningkatan koordinasi pelaksanaan tugas; pembinaan kemampuan manajemen dan informasi Kepolisian; sinkronisasi perencanaan kebijakan program dan anggaran dan integrasi serta kerjasama lintas sektor.

Bertujuan untuk menyelenggarakan fungsi manajemen kinerja Polri secara optimal dengan melaksanakan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pelaporan, pelayanan internal yang dilaksanakan secara tepat waktu, akuntabel dan terintegrasi antara Bidhumas Polda Jambi dan kewilayahan.

2). kegiatan:

1). Penerangan Masyarakat:

- a). Diskusi publik;
- b). Konferensi press;
- c). Kemitraan;
- d). Kegiatan Humas dan Pemberitaan;
- e). Honor narasumber diskusi public;
- f). Publikasi pesan kamtibmas melalui baliho.

2). Dukungan pelayanan internal perkantoran Polri:

- a). Pembayaran gaji dan tunjangan;
- b). Pengadaan perlengkapan /ATK Kantor;
- c). Kegiatan Humas dan Pemberitaan;
- d). Coffee Morning;
- e). Pendistribusian kalender;

- f). Rakernis;
 - g). Pelatihan giat Humas;
 - h). Operasional PPID;
 - i). Produk infografis Edukasi masyarakat;
 - j). Dukgar penyusunan Renja;
 - k). Dukgar penyusunan Rarenja;
 - l). Dukgar penyusunan LKIP;
 - m). Dukgar penyusunan RKA-KL;
 - n). Kegiatan supervisi ke satker/Polres
 - o). Perjalan Dinas mendampingi Kabid Humas giat Rakernis ke Jakarta;
 - p). Rapat koordinasi/kerja/dinas/pimpinan kelompok kerja/konsultasi;
 - q). Honorarium SAI/SAKPA/SIMAK/SIRENA;
 - r). Peningkatan layanan informasi publik melalui penyebaran / diseminasi informasi;
 - s). Penyusunan majalah;
 - u). Pengelola website.
- 4). Pengelolaan Multimedia
- a). Giat patrol siber;
 - b). Penggalangan jaringan cybertroops dan netizen;
 - c). Video Selayang pandang.
- 5). Pengelola Informasi dan Dokumentasi:
- a). Publikasi pesan kamtibmas melalui mobile trone;
 - b). Bimbingan teknis tentang informasi yang dikecualikan.

b. Program Modernisasi Almatsus dan Sarana Prasarana Polri;

1) Tujuan:

Terpeliharanya Harkamtibmas melalui tata kelola, modernisasi Almatsus dan sarana prasarana Polri guna mendukung pelaksanaan tugas fungsi bidang pembinaan dan operasional.

2) Kegiatan:

a) Pengembangan peralatan Polri;

b) Dukungan Manajemen dan Teknis Sarpras, yang terdiri dari:

(1). Pemeliharaan kendaraan bermotor roda 4;

(2). Pemeliharaan kendaraan bermotor roda 2;

(3). Pemeliharaan peralatan kantor.

2. Pagu Indikatif Bidhumas Polda Jambi T.A. 2023

a. Kebutuhan Pagu Indikatif Bidhumas Polda Jambi T.A. 2023. sebesar Rp. 4.738.923.000,-(Empat milyar tujuh ratus tiga puluh delapan juta Sembilan ratus dua puluh tiga ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

1) Rincian Pagu Indikatif Bidhumas Polda Jambi T.A. 2023. per **Jenis Belanja** sebagai berikut:

a) Belanja Pegawai : Rp.2.226.461.000,-

b) Belanja Barang : Rp.2.512.462.000,-

2) Rincian Pagu Indikatif Bidhumas Polda Jambi T.A. 2023. per **Sumber Anggaran** sebagai berikut:

a) Rupiah Murni : Rp.4.738.923.000,-

3) Rincian Pagu Indikatif Bidhumas Polda Jambi T.A. 2023. per **Program** sebagai berikut:

- a) Penerangan Masyarakat Rp. 417.960.000.-
- b) Dukungan Manajemen Rp. 4.036.164.000.-
- c) Pengelolaan Mulmed Rp. 85.489.000.-
- d) Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Rp. 109.010.000.-
- e) Modernisasi Almitsus dan Sarana Prasarana Polri
Rp. 90.300.000.-

b. Kegiatan yang berdasarkan Pagu Indikatif Bidhumas Polda Jambi T.A. 2023.

- 1) Mengakomodir kebutuhan pembayaran gaji dan tunjangan termasuk tunjangan kinerja, rekrutmen anggota Polri T.A. 2023;
- 2) Kegiatan operasional anggaran perkantoran (antara lain: biaya pemeliharaan serta keperluan perkantoran);
- 3) Kegiatan fungsi teknis Kepolisian, berupa: kegiatan Penmas, Mulmed dan PPID;
- 4) Melaksanakan pelatihan dan pendidikan dalam rangka peningkatan kualitas dan kapabilitas personel Bidhumas Polda Jambi, baik dibidang fungsi pembinaan maupun operasional agar semakin profesional modern dan terpercaya;
- 5) Mengakomodir kegiatan Program Prioritas Kapolri.

58 LAMPIRAN KEP BIDHUMAS POLDA JAMBI
NOMOR : KEP/ /X/2022
TANGGAL : OKTOBER 2022

V. Penutup

Demikian Rencana Kerja Bidhumas Polda Jambi Tahun Anggaran 2023 disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2023.

Ditetapkan di : Jambi
pada tanggal : Oktober 2022

KEPALA BIDANG HUBUNGAN MASYARAKAT
POLDA JAMBI

MULIA PRIANTO, S, Sos., S.I.K.
KOMISARIS BESAR POLISI 74100754

59 LAMPIRAN KEP BIDHUMAS POLDA JAMBI
NOMOR : KEP/ /X/2022
TANGGAL : OKTOBER 2022